

---

---

## Penggunaan Media Sosial Dengan Tingkat Pengetahuan Politik Siswa

Miftahul Rahman<sup>a,1\*</sup>, Suanto<sup>b,2</sup>

<sup>ab</sup>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Pamulang

<sup>1</sup>[rahmanmiftahul88@gmail.com](mailto:rahmanmiftahul88@gmail.com); <sup>2</sup>[dosen02190@unpam.id](mailto:dosen02190@unpam.id)

Naskah diterima: 26-01-2026, direvisi: 10-03-2026, disetujui: 30-03-2026

---

### Abstrak

Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan generasi muda. Berbagai platform media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai sumber informasi, termasuk informasi politik yang semakin mudah diakses oleh siswa. Kondisi ini menjadikan media sosial sebagai salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi tingkat pengetahuan dan kesadaran politik peserta didik di lingkungan sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara penggunaan media sosial dengan tingkat pengetahuan politik siswa di SMK Negeri 3 Kota Tangerang Selatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional, yang berfokus pada pengujian hubungan antara dua variabel, yaitu intensitas penggunaan media sosial dan tingkat pengetahuan politik siswa. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan teknik pengumpulan data berupa angket (kuesioner) yang disebarakan kepada responden. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data kuantitatif yang diukur menggunakan skala tertentu untuk mengetahui tingkat penggunaan media sosial serta tingkat pengetahuan politik siswa. Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa SMK Negeri 3 Kota Tangerang Selatan sebagai responden utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara penggunaan media sosial dengan tingkat pengetahuan politik siswa. Artinya, semakin tinggi intensitas penggunaan media sosial, maka semakin meningkat pula pengetahuan politik siswa. Meskipun demikian, media sosial tidak sepenuhnya dapat menggantikan peran pendidikan politik formal di sekolah. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan literasi digital agar siswa mampu menyaring, memahami, dan mengevaluasi informasi politik yang beredar di media sosial secara kritis dan bertanggung jawab.

**Kata kunci:** Undang-Undang media sosial, pengetahuan politik, pendidikan kewarganegaraan, siswa

---

### Abstract

*Social media has become an inseparable part of daily life, especially among young people. Various social media platforms function not only as sources of entertainment but also as important channels for information, including political content that is increasingly accessible to students. This condition positions social media as a significant factor that may influence students' levels of political knowledge and awareness within the school environment. This study aims to examine the relationship between social media usage and the level of political knowledge among students at SMK Negeri 3 Kota Tangerang Selatan. The research employs a quantitative approach with a correlational design, focusing on identifying the relationship between two variables: the intensity of social media use and students' political knowledge. The method used is a survey, with questionnaires as the primary data collection technique distributed to respondents. The data collected are quantitative in nature, measured using appropriate scales to assess both the level of social media usage and students' political knowledge. The primary data source consists of students from SMK Negeri 3 Kota Tangerang Selatan. The findings indicate a positive relationship between social media use and students' political knowledge, meaning that higher intensity of social media usage is associated with increased political understanding among students. However, social media*

*cannot fully replace the role of formal political education in schools. Therefore, this study highlights the importance of strengthening digital literacy so that students are able to critically filter, understand, and evaluate political information circulating on social media in a responsible manner.*

**Keywords:** *social media, political knowledge, civic education, students*

## **Pendahuluan**

Terutama dalam hal pengumpulan dan penyebaran informasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang mendalam terhadap kehidupan manusia. Perubahan ini terasa sangat nyata dalam kehidupan generasi muda yang terbiasa dengan dunia digital. Salah satu contoh konkret dari tren ini adalah kemunculan media sosial sebagai alat komunikasi yang cepat, sederhana, dan mudah diakses oleh berbagai kalangan, termasuk pelajar. Kehidupan sehari-hari remaja kini mengharuskan mereka untuk menggunakan media sosial, terutama siswa sekolah menengah kejuruan (SMK).

Pemahaman dan kesadaran siswa terhadap isu-isu sosial dan politik dipengaruhi oleh media sosial, yang digunakan untuk tujuan selain hiburan atau komunikasi dengan teman. Melalui media sosial, siswa dapat mengakses berbagai informasi politik yang aktual, mulai dari berita pemerintah, opini publik, hingga isu-isu kebangsaan yang sedang hangat diperbincangkan. Kondisi ini membuka peluang baru bagi dunia pendidikan, khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), untuk menjadikan media sosial sebagai salah satu sumber belajar yang relevan dan kontekstual.

Namun demikian, tidak semua siswa mampu memahami dan menyaring informasi politik secara tepat. Sebagian besar dari mereka hanya menerima informasi secara mentah tanpa analisis yang mendalam, sehingga menimbulkan kesalahan dalam memahami substansi politik yang sesungguhnya. Kurangnya kemampuan berpikir kritis dan minimnya literasi digital menjadi hambatan utama dalam proses ini. Di sisi lain, pembelajaran PPKn yang seharusnya membimbing siswa memahami kehidupan berbangsa dan bernegara, sering kali masih dilakukan dengan pendekatan yang konvensional dan teoritis, sehingga kurang menarik bagi siswa.

Melihat observasi dilaksanakan peneliti di SMKN 3 Kota Tangerang Selatan, diketahui bahwa hampir seluruh siswa memiliki akun media sosial dan aktif menggunakannya setiap hari. Mereka mengikuti berbagai akun yang berkaitan dengan hiburan, pendidikan, hingga politik. Namun, meskipun paparan terhadap konten politik cukup tinggi, pengetahuan politik yang dimiliki siswa cenderung rendah dan tidak terstruktur. Siswa tidak memahami secara utuh tentang lembaga-lembaga negara, sistem pemerintahan, hak serta kewajiban warga negara, serta pentingnya partisipasi dalam kehidupan demokrasi.

Realitas ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi media sosial sebagai sarana informasi politik dengan pembelajaran formal yang belum mampu mengoptimalkannya secara maksimal. Dengan demikian, diperlukannya studi guna melihat sejauh mana penggunaan media sosial berhubungan dengan tingkat pengetahuan politik siswa. Studi ini penting dilaksanakan supaya bisa memberi deskripsi terkait pengaruhnya media sosial pada wawasan politik siswa dan



sebagai masukan bagi guru guna mengembangkannya strategi pembelajaran yang lebih optimal dengan karakteristiknya siswa.

Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengungkap bagaimana intensitas dan jenis penggunaan media sosial dapat memengaruhi tingkat pengetahuan politik siswa. Dengan memahami hubungan antara kedua variabel tersebut, guru dan pihak sekolah diharapkan dapat mengambil langkah yang tepat dalam mengintegrasikan teknologi informasi, khususnya media sosial, ke dalam pembelajaran PPKn secara sistematis. Harapannya, siswa tidak hanya menjadi pengguna media sosial yang pasif, tetapi juga dapat menggunakannya secara produktif untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran politik mereka sebagai warga negara Indonesia yang baik.

Lebih jauh lagi, perkembangan teknologi dan media sosial turut memengaruhi karakter generasi muda dalam memahami kehidupan berbangsa dan bernegara. Generasi ini, yang tumbuh dalam era digital, cenderung memiliki ketergantungan tinggi terhadap perangkat elektronik dan informasi instan. Kebiasaan mengakses informasi melalui media sosial membentuk pola pikir yang cepat tanggap, tetapi sering kali dangkal dan tidak kritis. Dalam konteks ini, siswa memiliki peluang besar untuk mendapatkan informasi politik secara cepat dan aktual, namun seringkali tanpa proses penyaringan dan verifikasi. Ketika informasi politik dikonsumsi tanpa pemahaman yang tepat, hal ini dapat berdampak pada terbentuknya sikap politik yang keliru, apatis, atau bahkan sinis terhadap institusi negara dan proses demokrasi.

Selain itu, PPKn telah ditetapkan dalam kurikulum Indonesia sebagai mata pelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan siswa menjadi individu yang bertanggung jawab, berpengetahuan, dan aktif berpartisipasi dalam urusan nasional. PPKn membantu menanamkan nilai-nilai nasional yang mendasar, termasuk NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. Namun dalam pelaksanaannya, pembelajaran PPKn di sekolah masih menghadapi tantangan besar dalam menarik minat siswa, terutama ketika materi disampaikan secara satu arah dan bersifat teoritis. Hal ini menjadi hambatan tersendiri bagi guru dalam menumbuhkan pemahaman politik yang menyeluruh kepada siswa.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa potensi pemanfaatan media sosial dalam pembelajaran PPKn belum sepenuhnya digunakan secara maksimal. Para guru belum banyak yang memanfaatkan kecenderungan siswa terhadap media sosial sebagai peluang untuk mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Pembelajaran masih terjebak dalam metode ceramah dan hafalan, tanpa menyentuh konteks sosial-politik yang sedang berkembang di lingkungan digital siswa. Akibatnya, meskipun siswa mendapatkan paparan informasi politik dari media sosial, pemahaman mereka tidak berkembang secara kritis dan analitis, sehingga pembelajaran PPKn kehilangan momentum untuk menjadi ruang edukasi yang aktual dan bermakna.

Dengan demikian, studi terkait hubungannya antara penggunaan media sosial dengan tingkatan pengetahuan politik siswa jadi sangat penting dan relevan untuk dilaksanakan. Adanya harapan pada studi ini bisa memberi pemahamannya secara komprehensif terkait peranan media sosial dalam membentuk wawasan politik generasi muda. Selain itu, adanya harapan pada studi ini bisa jadi rujukannya bagi guru dan pembuat kebijakan pendidikan dalam merancang strategi pembelajaran PPKn yang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Integrasi media

sosial ke dalam kelas dapat membantu menutup kesenjangan antara keinginan siswa akan pendidikan politik berkualitas tinggi dan minat mereka di dunia digital.

## Metode

Studi Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional. Menurut Sugiyono (2020), metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan tujuan menguji hipotesis. Adapun metode korelasional, menurut Arikunto (2019), digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan serta tingkat hubungan antara dua variabel, yaitu penggunaan media sosial sebagai variabel bebas dan tingkat pengetahuan politik siswa sebagai variabel terikat.

Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas X dan XI SMKN 3 Kota Tangerang Selatan sebagai responden penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui angket (kuesioner) yang disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel. Analisis data dilakukan secara kuantitatif melalui uji validitas, uji reliabilitas, serta uji korelasi Pearson Product Moment untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

Melihat temuan angket yang disembarkannya pada siswa kelas X dan XI di SMKN 3 Kota Tangerang Selatan, diperoleh gambaran bahwa mayoritas siswa mempunyai intensitas penggunaan media sosial yang tinggi. Hasil tabulasi memperlihatkan platform seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan YouTube ialah media sosial mayoritas yang dipakai siswa. Sebagian besar siswa mengakses media sosial setiap hari, baik untuk hiburan, komunikasi, maupun mencari informasi. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial sudah jadi bagiannya integral pada kehidupan remaja dan merupakan sumber utama dalam memperoleh berbagai informasi, termasuk informasi politik.

Pengetahuan politik siswa dalam penelitian ini juga diukur melalui angket, dengan indikator meliputi pemahaman tentang struktur pemerintahan, proses pemilu, hak dan kewajiban warga negara, serta peran politik individu dalam kehidupan demokrasi. Temuan memperlihatkan mayoritas siswa mempunyai tingkatan pengetahuan politik yang cukup baik. Meskipun belum semua siswa memahami secara mendalam, mereka telah menunjukkan pemahaman terhadap topik-topik dasar politik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.

		Penggunaan Media Sosial	Tingkat Pengetahuan Politik Siswa
Penggunaan Media Sosial	Pearson Correlation	1	.465
	Sig. (1-tailed)		.000
	N	67	67
Tingkat Pengetahuan Politik Siswa	Pearson Correlation	.465	1
	Sig. (1-tailed)	.000	
	N	67	67

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.465a	.216	.204	9.421
a. Predictors: (Constant), Penggunaan Media Sosial				

Temuan analisa korelasi memakai uji Pearson Product Moment memperlihatkan ada hubungannya positif signifikan antara intensitas penggunaan media sosial dengan tingkatan pengetahuan politik siswa. Koefisien korelasi ( $r$ ) besarnya 0,465 memperlihatkan kekuatan hubungannya yang sedang, sementara signifikansinya ( $p = 0,000 < 0,05$ ) memperlihatkan hubungannya tersebut signifikan secara statistik. Artinya, makin tinggi penggunaan media sosial oleh siswa, semakin tinggi pula tingkat pengetahuan politik mereka.

Lebih lanjut, uji  $R^2$  menghasilkan nilainya 0,216, memperlihatkan besarnya 21,6% variasi dalam pengetahuan politik siswa dapat dijelaskan oleh variabel penggunaan media sosial. Angka sisa, besarnya 78,4%, dijelaskan oleh faktor lainnya di luar cakupan studi ini, seperti pengaruh keluarga, guru, lingkungan sosial, dan sumber informasi lainnya. Hasil ini menegaskan bahwa meskipun media sosial berkontribusi terhadap pengetahuan politik, namun ia bukan satu-satunya faktor penentu.

Sebagian siswa mengaku mendapatkan informasi politik dari akun-akun resmi pemerintah, tokoh publik, serta media berita nasional yang mereka ikuti. Konten yang sering mereka konsumsi antara lain berupa berita kebijakan, video kampanye, infografis, serta diskusi isu-isu sosial yang sedang viral. Hal ini selaras dengan pendapat Rahmawati dkk. (2019) menyatakannya media sosial mempunyai potensi besar pada peningkatan kesadaran politik, terutama pada kalangan remaja. Namun di sisi lain, akses informasi yang tanpa filter juga meningkatkan risiko siswa terpapar berita hoaks, propaganda politik, atau informasi yang menyesatkan.

Hasil pengisian angket menunjukkan bahwa siswa lebih tertarik pada konten politik yang dikemas secara visual, seperti video pendek dan meme, dibandingkan dengan artikel atau tulisan panjang. Ketertarikan terhadap tampilan visual ini mempengaruhi tingkat pemahaman mereka terhadap isu politik. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua siswa memiliki sikap kritis terhadap konten yang mereka lihat. Beberapa siswa mengaku menilai kebenaran informasi hanya berdasarkan jumlah "like" atau komentar yang banyak, tanpa memverifikasi sumber informasi terlebih dahulu.

Dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), guru mengakui bahwa media sosial sebenarnya bisa menjadi sarana pembelajaran yang kontekstual dan menarik bagi siswa. Namun, keterbatasan waktu dan metode pengajaran yang belum terintegrasi dengan media digital menyebabkan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Ketika materi pelajaran dikaitkan dengan isu-isu politik yang sedang viral di media sosial, siswa menjadi lebih tertarik dan aktif berdiskusi. Hal ini menunjukkan pentingnya inovasi pembelajaran yang relevan dengan kebiasaan digital siswa.

Perbedaan pola konsumsi informasi juga berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan politik siswa. Mereka yang secara selektif mengikuti akun-akun resmi, edukatif, dan terpercaya



cenderung memiliki pemahaman politik yang lebih utuh. Sebaliknya, siswa yang lebih banyak mengikuti akun hiburan, selebriti, atau konten viral yang tidak berorientasi edukatif, cenderung memiliki pengetahuan yang lebih dangkal dan tidak konsisten.

Penelitian ini juga menemukan gejala awal partisipasi politik digital dari siswa, seperti berkomentar pada isu-isu politik, membagikan konten kampanye, atau menyuarakan opini terhadap kebijakan pemerintah di media sosial. Walau masih informal, aktivitas ini mencerminkan adanya kesadaran dan ketertarikan terhadap dunia politik yang tumbuh dari paparan informasi digital. Ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya membentuk pengetahuan, tetapi juga mendorong keterlibatan partisipatif generasi muda.

Namun demikian, literasi digital yang rendah tetap menjadi tantangan utama. Sebagian besar siswa belum mampu membedakan antara opini dan fakta, atau mengenali bias informasi. Ini sejalan dengan pandangan Buckingham (2003) bahwa literasi media harus mencakup kemampuan analitis dalam menilai isi pesan, bukan sekadar keterampilan teknis dalam menggunakan perangkat digital. Dalam mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang kritis dan terinformasi di era informasi digital, penting untuk memasukkan literasi digital ke dalam kurikulum PPKn.

Secara keseluruhan, temuan studi memperlihatkan bahwa ada korelasi yang signifikan antara penggunaan media sosial serta tingkatan pengetahuan politik siswa. Namun, peningkatan pengetahuan tersebut akan lebih optimal jika disertai dengan kemampuan literasi digital yang baik serta dukungan dari lingkungan sekolah melalui pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Media sosial dapat menjadi alat edukatif yang sangat kuat bila digunakan secara tepat dan bertanggung jawab.

## **Kesimpulan**

Melihat temuan studi yang dilaksanakan di SMKN 3 Kota Tangerang Selatan, bisa dibuat simpulan ada hubungannya signifikan antara penggunaan media sosial dengan tingkatan pengetahuan politik siswa. Siswa yang menggunakan media sosial secara intensif memiliki pengaruhnya pada pemahaman mereka terhadap isu-isu sosial dan politik nasional maupun internasional. Hal ini terlihat dari kecenderungan mahasiswa untuk menggunakan YouTube, Instagram, TikTok, dan platform lain untuk mendapatkan informasi politik secara tidak langsung.

Media sosial memberi aksesnya yang luas dan cepat terhadap informasi politik, dan hal ini menjadi pintu masuk awal bagi siswa dalam mengenal istilah-istilah politik, memahami struktur pemerintahan, serta menyadari pentingnya partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, media sosial berperan sebagai ruang pembelajaran alternatif yang lebih kontekstual dan sesuai dengan karakteristik generasi digital saat ini.

Namun demikian, penggunaan media sosial oleh siswa dalam memahami isu-isu politik masih menghadapinya beragam tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kemampuan siswa dalam memilah dan menganalisis informasi yang mereka konsumsi. Banyak siswa belum dapat membedakan antara berita yang faktual dengan hoaks, atau antara opini dan informasi resmi. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan politik yang mereka peroleh dari media sosial masih bersifat permukaan dan rentan terhadap misinformasi.



Selain itu, penelitian ini juga mengungkap bahwa jenis konten yang dikonsumsi sangat memengaruhi tingkat pengetahuan politik siswa. Siswa yang aktif mengikuti akun berita, tokoh publik, atau lembaga pemerintah cenderung memiliki pemahaman politik yang lebih baik dibandingkan siswa yang lebih banyak mengakses konten hiburan. Ini menandakan bahwa kualitas informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap politik.

Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memegang peran penting dalam memfasilitasi pembelajaran yang relevan dengan kehidupan digital siswa. Studi ini memperlihatkan jika guru mampu mengaitkan materi pelajaran dengan isu-isu politik yang sedang hangat di media sosial, maka antusiasme dan partisipasinya siswa dalam pembelajaran ada peningkatan. Pembelajaran jadi lebih aktual, kontekstual, dan mampu menumbuhkan kesadaran politik secara bertahap.

Dengan demikian, meskipun media sosial bukanlah sarana pendidikan formal, namun keberadaannya dapat dimanfaatkan sebagai jembatan dalam pembelajaran politik yang lebih dinamis dan dekat dengan dunia keseharian siswa. Untuk itu, diperlukan upaya integratif antara pemanfaatan media sosial dan strategi pembelajaran di kelas, agar siswa tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga menjadi warga negara yang berpikir kritis dan aktif dalam kehidupan demokratis.

Secara keseluruhan, bisa dibuat simpulannya media sosial mempunyai peranan cukup besar dalam membentuknya pengetahuan politik siswa. Namun, agar peran tersebut dapat berdampak positif secara maksimal, perlu adanya penguatan dalam hal literasi digital, pendidikan politik yang berbasis pada konteks, serta kolaborasi antara guru, siswa, dan lingkungan sekolah dalam memanfaatkan media sosial sebagai sumber pembelajaran yang edukatif dan bertanggung jawab.

## **Referensi**

- Ardianto, E., & Komala, L. (2004). *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Buckingham, D. (2003). *Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture*. Cambridge: Polity Press.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayat, D. (2016). *Komunikasi Politik: Teori, Konsep, dan Strategi*. Jakarta: Prenada Media.
- Kosasih, D. (2019). *Strategi Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Bandung: Yrama Widya.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasrullah, R. (2017). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sositologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Rahmawati, A., dkk. (2019). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Tingkat Pengetahuan Politik Remaja. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(1), 1–12.
- Rakhmat, J. (2007). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.



Wibawa, S. (2020). Literasi Digital dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan di Era Industri 4.0. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 100–112.